

**PENATAAN KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik



Disusun oleh :

MUHAMMAD GUNAWAN RAMBE

NIM. 0810663048-66

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS TEKNIK

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENATAAN KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik



Disusun oleh :

MUHAMMAD GUNAWAN RAMBE
NIM. 0810663048-66

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Eddi Basuki Kurniawan, ST., MT.
NIP. 19740924 200312 1 003

Johannes Parlindungan, ST., MT.
NIK. 810416 06 1 1 0137

LEMBAR PENGESAHAN

**PENATAAN KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik

Disusun oleh :

MUHAMMAD GUNAWAN RAMBE
NIM. 0810663048-66

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus pada:
3 Juni 2013

Penguji I

Dr. Ir. Surjono, MTP.
NIP. 19650518 199002 1 001

Penguji II

Dian Kusuma Wardhani, ST., MT.
NIP. 19790307 200801 2 016

Mengetahui

Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Ir. Surjono, MTP.
NIP. 19650518 199002 1 001

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Saya yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Gunawan Rambe

NIM : 0810663048-66

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam hasil karya Skripsi/Tugas Akhir, baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur penjiplakan karya Skripsi/Tugas Akhir yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah Skripsi/Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan dari karya Skripsi/Tugas Akhir orang lain, maka saya bersedia Skripsi/Tugas Akhir dan gelar Sarjana Teknik yang telah diperoleh dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 3 Juni 2013
Yang membuat pernyataan,

Muhammd Gunawan Rambe
NIM. 0810660046-66

Tembusan :

1. Kepala Laboratorium Skripsi/Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
2. Dua (2) Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir yang bersangkutan
3. Dosen Pembimbing Akademik yang bersangkutan

RINGKASAN

Muhammad Gunawan Rambe, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Juni, 2013. *Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan*. Dosen Pembimbing, Eddi Basuki Kurniawan, ST., MT. dan Johannes Parlindungan, ST., MT.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pemerintah, harus di dukung oleh sarana dan prasaran pendukung kegiatan Pemerintah sehingga birokrasi dapat berjalan dengan lancar. Salah satu sarana pendukung kegiatan utaman Pemerintahan adalah berupa lahan untuk gedung kantor. Pada umumnya peletakan lahan gedung perkantoran SKPD tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia terpencah satu sama lain dan tidak dalam satu kompleks/kawasan. Sehingga koordinasi antar SKPD maupun pelayanan terhadap masyarakat menjadi kurang efektif jika di kaji dari segi jarak dan waktu. Kurangnya perencanaan yang matang mengakibatkan tidak optimalnya penataan ruang denan baik. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah yang sudah memenuhi persyaratan untuk di mekarkan dapat dimekarkan menjadi Pemerintahan baru dan mampu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pemerintahan.

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Kabupaten Induk dari pemekaran Wilayah Kabupaten Padanglawas dan PadangLawas Utara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 dan 38 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara. Pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 dan 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan beribukota di wilayah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sebelumnya berada di Kota Padangsidimpuan. Menindak lanjuti penetapan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 244/Menhut-II/2011 Tanggal 29 April 2011 Tentang Penetapan Area Hutan Produksi yang dilepaskan untuk pertapakan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 271,10 hektar yang terletak di Desa Dano Situmba Kecamatan Sipirok. Perubahan fungsi lahan Hutan Produksi menjadi kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, akan memberikan pengaruh negatif terhadap penurunan kualitas lingkungan pada kawasan dan sekitar kawasan.

Untuk mengantisipasi pengaruh negatif terhadap penurunan kualitas lingkungan, perlu dilakukan kajian terhadap kemampuan dan kesesuaian lahan yang bertujuan menentukan pemanfaatan lahan yang sesuai untuk pengembangan lahan yang dapat di jadikan sebagai bangunan perkantoran. dari hasil analisis tersebut menghasilkan kemampuan lahan dengan kemampuan lahan tinggi seluas 44,87 Ha. dan kemampuan pengembangan agak tinggi seluas 67,43 Ha. Selain itu, analisis tapak dan metode dekomposisi digunakan untuk memberikan informasi terkait perencanaan tapak melalui tahap inventarisasi data, analisis, dan konsep. Dari proses analisis tersebut menghasilkan zona untuk peruntukan setiap perkantoran SKPD, Zona A untuk perkantoran SKPD unsur Pimpinan Daerah dan Legislatif beserta pembantu tugas Pimpinan Daerah maupun Legislatif, Zona B untuk perkantoran SKPD non-pelayanan masyarakat, sedangkan Zona C untuk perkantoran SKPD pelayanan masyarakat.

Kata Kunci : Kabupaten Tapanuli Selatan, Perencanaan Tapak, Kawasan Perkantoran